



2025

RENJA

RENCANA KERJA

DP3AP2KB



Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lt. III
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Telepon/ Fax (022) 6632338
Cimahi 40513 Jawa Barat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
BAB I PENDAHULUAN.....	II
1.1. LATAR BELAKANG	II
1.2. LANDASAN HUKUM	IV
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	IX
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	IX
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	42
2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	44
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	52
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	72
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB KOTA CIMAHI.....	74
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	74
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	74
3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025.....	76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	101
4.1. Rencana Program dan Kegiatan	101
4.2. Rencana Pagu Indikatif.....	101
BAB V PENUTUP.....	110

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2025 Kota Cimahi dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) disusun sebagai acuan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada anggaran 2025 yang mengacu pada realisasi kinerja tahun anggaran 2023, Renja merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan ditahun 2025.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan perencanaan yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Cimahi serta pemberdayaan masyarakat namun demikian kami berharap Renja ini akan menjadi arah dan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2025 Kota Cimahi.

Kami berharap melalui Rencana (RENJA) ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi dapat mewujudkan Rencana Pembangunan daerah Tahun 2023 – 2026. Visi Kota Cimahi yaitu Cimahi CERDAS.

Cimahi,

2024

 **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA
CIMAHI,** 



dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680101 199803 2 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya upaya secara sadar dan terencana. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, secara teknokratis, politis, partisipatif, dan top down/bottom up. Perencanaan yang disusun merupakan perencanaan partisipatif yang artinya disusun secara responsive berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat tersalurkan dalam forum Grup Discusion yang melibatkan mitra kerja yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AKBP2A Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023 – 2026 serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi adalah bagian dari Rencana Pembangunan daerah Kota Cimahi yang menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan merupakan implementasi RPD yang merinci langkah langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD serta memuat berbagai rencana Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB Kota Cimahi serta selaras pula dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang menjadi pedoman dalam penyusunan seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan melaksanakan pengkajian dan analisa terlebih dahulu terhadap kondisi riil lapangan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya sebelum terpisah menjadi dinas yang mandiri dalam hal urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya belum tergabung dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi.

Masalah kependudukan di Kota Cimahi menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius karena akan membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, masalah migrasi penduduk yang sangat dinamis juga laju pertumbuhan penduduk yang harus dapat dikendalikan mengingat Kota Cimahi mempunyai wilayah yang sangat terbatas, karenanya pelayanan keluarga berencana harus terus ditingkatkan dapat diakses secara mudah begitu juga halnya dengan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merupakan urusan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi di masyarakat terlebih pada masa pandemik karena permasalahan ekonomi akibat dampak covid sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, oleh sebab itu penanganan masalah tersebut

serta pencegahannya harus terakomodir dalam program dan kegiatan yang ada.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi mengampu dua misi Wali Kota Cimahi, yaitu Misi 1 dan misi 5 dari 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekoomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan kedua misi yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi maka disusunlah Rencana Kerja yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggran DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja DP3AP2KB Kota Cimahi sebagai berikut :

A. Landasan Hukum Umum :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
11. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
18. Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana bagi PNS;
19. Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Admiistrasi kedalam Jabatan Fungsional;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2006, tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi;
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2022 LD. Nomor 288 . TLD Nomor 47 Tanggal 30 Desember 2021;
23. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Peragkat Daerah Kota Cimahi;
24. Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 BD. 645, TBD Nomor 125 Tanggal 30 Desember 2021.

B. Landasan Hukum Material, terdiri dari :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

- m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 - n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan;
 - o. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
 - p. Permen PP&PA No.11 Thn 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA;
 - q. Peraturan menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD Perlindungan PPPA;
 - r. Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
 - f. Undang Undang Nomor 52 tahun Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- f. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja DP3AP2KB Tahun 2025 adalah agar memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025 dan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja terkait, mengoptimalkan sumber daya agar lebih efektif dan efisien serta menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD DP3AP2KB Tahun Anggaran 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.easoning dan telaahan terhadap capaian target awal tahun serta pendanaannya.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Program Dan Kegiatan
- 4.2. Rencana Pagu Indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi tahun 2023.

Evaluasi yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi tahun 2023 mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Pada tahun 2023 anggaran yang diterima oleh DP3AP2KB Kota Cimahi berjumlah sebesar Rp. 19.358.184.070,-. Belanja langsung dijabarkan untuk pendanaan program dan kegiatan yang terdiri dari 12 Program dan 24 Kegiatan 59 Sub Kegiatan.

Realisasi yang dicapai pada tahun 2023 secara keseluruhan dari belanja sebesar Rp. 19.358.184.070,- terealisasi sebesar Rp. 18.171.074.905 atau sebesar 93,87%. Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat memberi gambaran dan langkah langkah yang harus ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi pada tahun 2025 yang akan datang.

Belanja langsung tersebut dibagi kedalam tiga urusan yang diampu oleh DP3AP2KB Kota Cimahi yaitu :

- a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 7.577.077.700,- terdiri dari 3 program dan 8 kegiatan, 25 Sub Kegiatan. Sasaran dari pelaksanaan urusan ini adalah meningkatnya pengendalian penduduk, Meningkatnya kemandirian aksepor KB MKJP dan Meningkatnya pemberdayaan dan

- Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan realisasi sebesar Rp. 7.302.757.450,- atau sebesar 96,38%.
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.672.965.050,-. Terdiri dari 6 Program dan 7 kegiatan 8 Sub Kegiatan. Dengan realisasi sebesar Rp. 1.418.347.847 atau sekitar 85%. Sasaran urusan ini adalah Terpenuhinya penyediaan data gender dan anak, Meningkatnya pemenuhan Hak Anak, Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak, dan Meningkatnya Perlindungan Perempuan.
 - c. Urusan kesekretariatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.580.132.220,- Terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan 17 Sub kegiatan Realisasi sebesar Rp.7.211.659.915,- atau sekitar 95,14% Sasaran urusan ini adalah Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum bagi unit kerja, meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi , meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan .

2.1.1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target :

- a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (84%)
- b. Persentase Kelurahan yang terbina (56%)
- c. Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam UPPKA (26%)
- d. Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam BKB (78%)
- e. Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam Plk R/M (91%)

2.1.2. Realisasi Program /Kegiatan Yang memenuhi target :

Terdapat 6 indikator kinerja Program yang berhasil mencapai target kinerja 100% yaitu :

- a. Nilai IKM
- b. Cakupan Keluarga yang mendapat Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- c. Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapat penanganan terpadu
- d. Persentase perempuan Korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu
- e. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
- f. Rata- rata jumlah anak per keluarga

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil

Terdapat 9 Indikator program yang melebihi target yaitu :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- b. Indeks Profesionalisme ASN
- c. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki data terpilah Gender
- d. Persentase Anak Yang terlayani Kebutuhan Dasar
- e. UnMeet Need (Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi)
- f. Rasio Akseptor KB MKJP
- g. Cakupan PUS kurang dari 20 tahun
- h. Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR
- i. Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL

2.1.4. Faktor - Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

a. Meningkatnya Nilai SAKIP

Untuk indikator kinerja pertama yakni Meningkatnya nilai SAKIP DP3AP2KB Kota Cimahi capaian kinerja yang diperoleh adalah A dari target yang ditetapkan yaitu BB. Hal ini bisa terwujud karena adanya tindak lanjut dari hasil TLHP dan Review dari Inspektorat sehingga kita bisa memperbaiki apa yang kurang dan yang harus dilengkapi dalam pemenuhan nilai SAKIP ditahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB dapat bekerja lebih maksimal serta mengerahkan semua sumber daya demi perbaikan Nilai SAKIP dan hal ini menunjukkan capaian kinerja DP3AP2KB lebih baik lagi.

b. Indeks Profesionalisme ASN

Indikator kinerja yang kedua adalah Indeks Profesionalisme ASN yang ditargetkan sebesar 50% ternyata capaian kinerja indikator ini adalah 64,5% dan capaian kinerjanya sebesar 129% hal ini menunjukkan kinerja DP3AP2KB Kota Cimahi tentang Profesionalisme Pegawai sudah sangat bagus, capaian kinerja ini didukung oleh adanya pegawai yang sudah menyelesaikan pendidikan kesetaraan misalnya dari lulusan SMA menjadi lulusan S1 serta banyaknya pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dari kementerian atau urusan yang

diampu oleh DP3AP2KB dan adanya beberapa pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan.

c. Nilai IKM Perangkat Daerah

Indikator kinerja untuk sasaran strategis berikutnya adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai ini daritahun pertama DP3AP2KB berdiri selalu naik . Indeks inibisa dicapai karena adanya survey yang dilakukan atas pelayanan publik yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Cimahi yaitu pelayanan KB bergerak yang diberikan untuk masyarakat Kota Cimahi. Dari hasil survey yang dilakukan dapat terlihat adanya kepuasan dari masyarakat yang diberi layanan.

d. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ditargetkan sebesar 69% pada tahun 2023 tercapai sebesar 58% dengan capaian kinerja sebesar 84%. hasil ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah ASN perempuan dibagi jumlah keseluruhan jumlah ASN yang ada di Pemkot Cimahi. Indikator ini tidak tercapai karena banyaknya ASN/PNS perempuan yang semula menduduki jabatan structural menjadi jabatan fungsioanal penyetaraan, bukan berartipartisipasi perempuan di lembaga pemerintah menurun hanya saja terjadi perubahan status dari yang semula jabatan structural dengan kewenangan yang luas dan berbeda dari jumlah ASN biasa menjadi jabatan fungsional penyetaraan berdasarkan perundang undangan yang berlaku.

e. Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga

Indikator selanjutnya yang dievaluasi adalah persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga, realisasi kinerja indikator ini tercapai 100% dari target 100%. Perlu kami informasikan bahwa Program dan kegiatan ini mempunyai sasaran 100 Keluarga binaan di Lokasi P2WKSS Lokasi untuk Program ini setiap tahun selalu berpindah dari satu kelurahan ke kelurahan lain, dan kriteria lokus yang ditentukan juga dengan indicator yang memang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang sesuai

dengan yang sudah ditentukan , dimana lokasinya harus di tempat yang memerlukan program tersebut, dengan harapan apabila 100 KK Binaan yang ditentukan tersebut telah mendapatkan pembinaan, pemberian pengetahuan dan wawasan tentang berbagai macam pelatihan, modul modul dari para fasilitator harapannya dapat meningkatkan perekonomian serta menambah keterampilan yang dapat meningkatkan dan menambah pendapatan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bagi mereka.

f. Persentase Perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender

Indikator kinerja persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender mempunyai target sebesar 70% dan yang diperoleh sebesar 80% maka capaian kinerja untuk indicator ini adalah sebesar 114 %, hal ini menunjukkan bahwa OPD yang ada Pemkot Cimahi telah mampu untuk bisa memilah data gender, hal ini sangat penting untuk dapat menentukan jumlah kebutuhan perencanaan dan sasaran yang ditentukan sehingga perencanaan pembangunan benar benar sesuai kebutuhan.

g. Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar

Indikator Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar mempunyai target 87% , indikator ini hanya dihitung dari ketiga kebutuhan dasar anak yang harus dilayani yaitu kebutuhan pendidikan dasar (SD, SMP), Imunisasi dasar dan status kependudukan anak di Kota Cimahi dengan hasil ketercapaian sebesar 106%, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi senantiasa hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya terlebih kebutuhan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa.

h. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu

Indikator Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu ditargetkan 100% dan tercapai 100% artinya semua pengaduan tindak kekerasan terhadap anak yang diterima oleh P2TP2A Kota Cimahi selalu diselesaikan dan tertangani seluruhnya. Penanganan dan pelayanan yang diberikan tidak saja pada pendampingan psycologis, pendampingan psyco sosial akan tetapi

sampai pada tahapan pendampingan hukum dan medis juga. Selama tahun 2023 terdapat 28 Kasus terhadap anak diantaranya 16 kasus terhadap anak laki laki dan 12 kasus terhadap anak perempuan.

Tindak kekerasan terhadap anak setiap tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini bisa terjadi karena banyak factor dan kemungkinan besar mengapa mengalami peningkatan karena adanya kemauan dan keberanian dari masyarakat ataupun korban tindak kekerasan yang berani melapor serta adanya kemudahan akses pelaporan. Namun belum sepenuhnya dilaporkan, mungkin saja masih terdapat kasus kasus tindak kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga. Namun Pemerintah Kota Cimahi melalui DP3AP2KB akan senantiasa memberikan pelayanan yang optimal terhadap penanganan kasus kasus tersebut.

i. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat Penanganan terpadu

Sama halnya dengan penanganan kasus terhadap kekerasan kepada anak, bahwa perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan akan selalu mendapatkan penanganan yang terpadu sampai kasus tersebut selesai. Tahun 2023 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sebanyak 33 kasus yang ditangani oleh P2TP2A. Selama kasus tersebut berjalan DP3AP2KB melalui P2TP2A memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban perempuan baik berupa penanganan psyhis, penangan medis dan keamanan bagi korban tersebut serta memberikan pendampingan hukum serta home visit untuk menggali lebih dalam dan mencari informasi yang luas baik terhadap korban maupun informasi dari lingkungan sekitarnya. Indikator ini ditargetkan 100 % dan realisasinya 100% sehingga capaian kinerjanya 100% artinya bahwa semua pengaduan dari perempuan yang menjadi korban kekerasan ditangani oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui DP3AP2KB.

j. Persentase Kelurahan yang terbina

Untuk Indikator Persentase Kelurahan yang terbina mempunyai target sebesar 100% dan realisasi sebesar 56% sehingga capaian kinerja yang diperoleh 56%%. Bahwa setiap kelurahan yang ada di Kota Cimahi yang berjumlah sebanyak 15 Kelurahan selalu mendapat

pembinaan dari DP3AP2KB melalui kegiatan sosialisasi Prodeskel (Profil Desa/Kelurahan) yang bertujuan untuk memberikan informasi dan cara cara penginputan berbagai data terkait dengan kewilayahan, geografis, ekonomi, kependudukan dan yang lainnya sebanyak 127 indikator inputan sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2015 yang harus dilakukan oleh Kelurahan dan data hasil inputan tersebut langsung terkoneksi ke Pusat. Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar kelurahan adalah kurangnya SDM yang menginput sehingga sering terjadinya keterlambatan atau bahkan tidak dilakukannya penginputan oleh kelurahan. Hal ini berdampak kepada rendahnya capaian kinerja, dari 15 Kelurahan baru sekitar 8 Kelurahan yang bias melakukan input secara tuntas, dan 7 kelurahan yang lain masih berproses sehingga laporan akhir yang dapat kami hitung untuk capaian kinerja ini masih 56%. Bahwa DP3AP2KB harus berupaya lebih keras lagi membangun koordinasi dengan semua kelurahan, memberikan saran untuk penambahan SDM di kelurahan dan memberikan sosialisasi lebih inten agar semua kelurahan dapat menyelesaikan Profil kelurahan masing masing.

Hasil inputan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh kelurahan dan outputnya berupa Profil kelurahan akan menjelaskan apakah kelurahan tersebut berkembang, belum berkembang atau bahkan cepat berkembang. Profil tersebut dapat dijadikan bahan sebagai syarat agar Kelurahan tersebut dapat diikutsertakan pada lomba kelurahan baik di tingkat Kota Propinsi atau Nasional.

k. Pesentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan aktif

Indikator kinerja Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan aktif targetnya 100% dan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya 100%. Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diampu oleh DP3AP2KB terdiri dari PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM serta RW dan RT. Keseluruhan lembaga tersebut berperan cukup aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di DP3AP2KB Kota Cimahi, artinya bahwa kelembagaan tersebut berdaya dan berperan aktif dalam segala hal kegiatan yang ada kaitannya dengan kemasyarakatan sesuai dengan tugas fungsi kelembagaan termaksud.

l. Rata rata jumlah anak per keluarga

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah rata rata jumlah anak per keluarga yang tercapai 100%. Ini menunjukkan bahwa pasangan usia subur yang ada di Kota Cimahi rata rata mempunyai anak antara 2 sampai 3 orang, hal tersebut menunjukkan semakin sadarnya masyarakat untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga mereka demi mewujudkan keluarga sejahtera. Petugas lini lapangan bisa berbangga dengan capaian indikator ini.

m. Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB)

Indikator Unmeet Need (Persentase kebutuhan ber-KB) mempunyai target 13% dan realisasinya sebesar : 12,7% capaian kinerja tahun 2023 sebesar 102% % Keberhasilan capaian kinerja ini membuktikan bahwa kebutuhan ber KB masyarakat yang tidak terlayani sudah dapat terpenuhi. Hal ini berkat kerja keras Bidang Pengendalian Penduduk dan KB melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan diantaranya pelayanan KB bergerak serta adanya kerjasama anatar DP3AP2KB dengan pusat pusat fasilitas kesehatan yang ada di Kota Cimahi serta berdampaknya kegiatan Konseling, Informasi dan Edukasi kepada sasaran KB serta pasangan usia subur yang tidak ber-KB.

n. Rasio akseptor KB MKJP

Indikator rasio akseptor KB MKJP ditargetkan sebesar 34,92% dengan realisasi sebesar 37,4% dengan capaian kinerja sebesar 107% indikator ini merupakan indicator yang baru yang menjadi sasaran program KB ini menunjukkan bahwa pasangan usia subur yang ber KB sudah cukup banyak yang beralih cara KB dari Pil/kondom atau kontrasepsi jangka pendek ke pemakaian kontrasepsi jangka panjang ini mereka lakukan untuk menghindari resiko yang mungkin akan terjadi pada Pasangan Usia Subur yang ber KB apabila mereka belum menggunakan cara berKB MKJP, serta keberhasilan para Lini lapangan atau Penyuluh KB dan Teladan KB dalam meyakinkan PUS untuk menggunakan Kontrasepsi MKJP.

o. Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 Tahun

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah Cakupan Pasangan Usia subur < 20 Tahun dengan realisasi sebesar 0,3 %

dengan capaian kinerja sebesar 117% ini menunjukkan bahwa di Kota Cimahi Pasangan Usia Subur yang dibawah 20 tahun yang menikah mengalami penurunan artinya bahwa di Kota Cimahi usia ideal untuk perkawinan sudah diatas 20 tahun. Ini menunjukkan keberhasilan program KB melalui bebrbagai kegiatan yang dilakukan DP3AP2KB dengan bidang P2KB sudah cukup berhasil dengan dukungan Teladan KB, Penyuluh Lapangan KB serta bantuan para Kader dilapangan melaluim KIE.

p. Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB

Indikator kinerja cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB merupakan indikator baru yang harus dievaluasi dan hasil kinerja diperoleh sebesar 34% dari target 47% dengan capaian kinerja sebesar 78,29 % angka ini diperoleh dari jumlah anggota yang hadir di pertemuan dibagi jumlah keluarga anggota BKB dari jumlah Kader pendamping sebanyak 1314 dan jumlah anggota keluarga BKB sebanyak 3772. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang mempunyai Balita lebih sedikit hadir dipertemuan kelompok karena ibu ibu muda lebih mempunyai akses yang luas melalui media social untuk mencari informasi dan parenting pengasuhan balita mereka, terkait pola asuh anak dan sebagainya.

q. Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam BKR atau Bina Keluarga Remaja dengan target sebesar 26,95 % tercapai sebesar 41,1% jadi capaian kinerja sebesar 152% capain ini menunjukkan berhasilnya KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi terhadap sasaran keluarga yang mempunyai remaja serta tingginya minat remaja Kota Cimahi untuk hadir dipertemuan kelompok untuk mendapatkan berbagai informasi.

r. Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL

Cakupan Kepesertaan keluarga dalam BKL atau Bina Keluarga Lansia dengan target sebesar 29,72% tercapai sebesar 47,7% capaian kinerja sebesar 160% capain ini menunjukkan berhasilnya KIE yang dilakukan oleh DP3AP2KB serta tingginya minat para lansia untuk bergabung di kelompok BKL untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan misalnya cek tensi darah secara gratis, serta layanan lain dan

informasi terkait kesehatan dan aktifitas lansia lainnya yang diperoleh di Kelompok BKL juga peran serta para kader dan petugas lini lapangan dalam memberikan KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) dengan sasaran usia lanjut usia yang dilakukan oleh DP3AP2KBA Kota Cimahi.

s. Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam UPPKA mempunyai target 0,87% dengan realisasi sebesar 0,23 % sehingga capaian kinerja sebesar 26 %, ketercapaian indikator ini tidak memenuhi capaian target kinerja karena banyaknya UPPKA yang naik kelas menjadi anggota UMKM di lingkungannya ini merupakan bentuk keberhasilan pembinaan dan pelaksanaan program pembinaan keluarga yang dilakukan oleh DP3AP2KB didukung oleh banyak faktor terlebih dimasa pandemic setiap keluarga akan berusaha untuk bertahan hidup dan menaikkan pendapatan keluarga dengan berbagai cara tanpa harus keluar rumah (jualan on line) peran media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta optimalnya pelaksanaan KIE kepada masyarakat.

t. Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam PIK R/M (Pusat Informasi Keluarga Remaja dan Mahasiswa) hanya tercapai 8,3% dari target sebesar 9,12% dengan capaian kinerja sebesar 91% hal ini tidak memenuhi capaian kinerja dikarenakan mahasiswa sudah kembali beraktifitas dikampus masing masing pasca pandemic dan banyak melakukan kegiatan dan berkegiatan dikampus, serta para mahasiswa dapat dengan mudah mengakses berbagai macam kegiatan dan informasi melalui media social yang mereka miliki

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DP3AP2KB dan Pencapaian Renstra DP3AP2KB s.d. Tahun 2024
Kota Cimahi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Penunjang PD	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan monev yang disusun	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Jumlah Dokumen Evaluasi PD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100 %	14 Bulan	14 Bulan	100 %
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										

					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah ASN yang dibina	33 orang	33 Orang	33 Orang	33 Orang	100 %	33 Orang	33 Orang	100 %
					Administrasi Umum Perangkat Daerah									
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan fasilitasi perjalanan dinas dan koordinasi, dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah unit fasilitas tempat yang disewa	2 gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung	100 %	2 gedung	2 gedung	100 %
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100%

					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan fasilitasi perbaikan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan fasilitasi Pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas	Jumlah Bulan fasilitasi penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									

					Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG (7 prasyarat penilaian APE : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM, data dan sistem informasi, metode dan partisipasi masyarakat/kerja sama	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
					Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									

					Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)									
					Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi pengembangan KIE pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									

					Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %			
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK												
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
					Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	jumlah dokumen data terpilah gender yang Kota cimahi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %			

					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
					Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah advokasi pemenuhan hak anak	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	jumlah dokumen hasil evaluasi koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									

				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah dokumen profil desa	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100 %	15 dokumen	15 dokumen	100 %
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan Kelurahan penataan,	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									

					Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %

				Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)									
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %
				Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %

					Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Bulan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)Jumlah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
					Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	-	-	-	-	-	-	-	-
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
					Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
					Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	jumlah fasilitasi pembentukan sekolah siaga kependudukan	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	100 %	2 sekolah	2 sekolah	100 %

				SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)									
				Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB									
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal									

				Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	60 %	6 Bulan	6 Bulan	60 %
				Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	10 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	60 %	6 Bulan	6 Bulan	60 %
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	60 %	6 Bulan	6 Bulan	60 %
				Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian)	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan	10 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	60 %	6 Bulan	6 Bulan	60 %

				Pengendalian Program KKBPK (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)									
				Pengendalian Program KKBPK (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi audit kasus stunting	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	100 %
				Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									
				Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan fasilitasi penggerakkan kader institusi masyarakat pedesaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									

				Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan fasilitasi pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	10 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	100 %	6 bulan	6 bulan	60 %
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah akseptor MKJP terlayani	1125 akseptor	1125 akseptor	1125 akseptor	1125 akseptor	100 %	1125 akseptor	1125 akseptor	100 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Pasar Rakyat	Jumlah paket sarana penunjang pelayanan KB yang disediakan	1 paket	1 paket	1paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	100 %

					Sub Kegiatan pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan	10 bulan	10 bulan	10 bulan	10 bulan	100 %	10 bulan	10 bulan	100 %
					Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi dukungan operasional pelayanan KB bergerak	200 akseptor	200 akseptor	200 akseptor	200 akseptor	100 %	200 akseptor	200 akseptor	100 %
					Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
					Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	10 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	100 %	6 bulan	6 bulan	60 %

					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												
					Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah unit BKB Kit Stunting yang disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %			
					Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah bulan penyediaan operasional bagi pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga	10 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	60 %	6 bulan	6 bulan	60 %			

				Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
				Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									

				Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Jumlah fasilitasi promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	2 kegiatan		
--	--	--	--	---	---	------------	------------	------------	------------	-------	------------	--	--

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan kewenangan urusan-urusan yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi menargetkan pelaksanaan kewenangan pelayanan terhadap masyarakat dalam urusan Perlindungan Anak dan perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat daam bentuk Indikator Kinerja Utama yaitu :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kota Cimahi :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)	(12)
1	Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	CPR	65 %	66%	68 %			
2	Meningkatnya Pengaarusutamaan Gender	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26,67 %	26,67 %	26,67 %			
			Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	37,50 %	38 %	58 %			
			Persentse partisipasi dalam kegiatan ekonomi	31,65 %	32,65 %	45%			
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %			

	Meningkatkatn ya Perlindungan terhadap Anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak dan perempuan	Persentase Capaian Kota Layak Anak	51 %	52 %	75 %			
	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan Inovasi pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DP3AP2KB	30 %	30 %	75,15 %			

Perlu kami informasikan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :
 - a. Rata rata jumlah anak perkeluarga 100 %
 - b. Rasio Akseptor KB MKJP 107%
 - c. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi 102%
 - d. Cakupan PUS dibawah< 20 Tahun 117 %
 - e. Cakupan kepesertaan dalam BKB 78%
 - f. Cakupan Kepesertaan dalam BKR 152%
 - g. Cakupan Kepesertaan dalam BKL 160%
 - h. Cakupan Kepesertaan dalam UPPKA 26%
 - i. Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam PIK R/M 91%
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :
 - a. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah 84%
 - b. Jumlah Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga 100%
 - c. Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu 100%
 - d. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data terpilah gender gender 114%
 - e. Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar 106%
 - f. Persentase Anak korban kekerasan yang mendaat penanganan terpadu 100%
3. Urusan Pemberdayaan masyarakat, yaitu :
 - a. Persentase kelurahan yang terbina 56 %
 - b. Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan aktif 100%

2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana, DP3AP2KB Kota Cimahi mengacu dan memperhatikan pada kebijakan di tingkat Nasional dan Propinsi, Tugas pokok yang diharapkan bias semakin focus pada bidang kerjanya dan tentu saja memiliki tanggungjawab yang sangat luas dan kompleks mengingat urusan yang diampu lebih dari satu urusan .

Meskipun demikian, sudah menjadi kewajiban bagi semua jajaran dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada konteks tersebut, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok yang diemban maka DP3AP2KB mempunyai beberapa fungsi utama dan strategik, yaitu:

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;

- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara legal-formal dalam Peraturan yang ada, maka sebagai suatu organisasi perangkat daerah, DP3AP2KB dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam mengemban amanahnya mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya, dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi dari Disdagkoperin, maka Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang. Hal itu sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

• **Sekretariat terdiri atas:**

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

• **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** sebagaimana dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Sebagaimana dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan
- c. Seksi Pengembangan Potensi dan Ekonomi Masyarakat.

- **Jabatan Fungsional**

Seiring dengan diberlakukannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka jabatan structural yang semula ada di setiap Bidang menjadi jabatan fungsional yang disesuaikan dengan nama jabatan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Setiap Bidang mempunyai jabatan Fungsional tertentu yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya sebelum Permenpan tersebut diberlakukan. Harapannya adalah agar setiap ASN mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan. Jabatan fungsional saat ini tidak terikat pada pekerjaan dan tupoksinya saja, akan tetapi bisa melaksanakan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan apabila dibutuhkan oleh organisasinya ataupun oleh SKPD lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, DP3AP2KB Kota Cimahi mengacu dan memperhatikan pada kebijakan dari tingkat Nasional hingga Provinsi, sebagai berikut:

A. Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Hak Anak

Perempuan dan anak-anak sebagai kelompok masyarakat yang diidentikkan dengan kelompok masyarakat yang mempunyai posisi yang lemah, baik secara historis, budaya, maupun kondisi fisik, serta tidak mempunyai kapasitas untuk mampu membuat keputusan bahkan bagi dirinya sendiri. Pemikiran dasar tersebut membedakan konsep pemberdayaan perempuan

dari konsep pemberdayaan masyarakat, bukan *empowerment* yang berkaitan dengan kekuasaan, namun cenderung sebagai sebuah upaya meningkatnya akses perempuan terhadap berbagai sumberdaya (ekonomi, politik, sosial, budaya, dll) dan meningkatnya kemampuan perempuan di berbagai bidang (pendidikan, keterampilan, dll). Sedangkan 'empowerment' dari kata 'empower' artinya member kuasa, atau makna yang dipahami dalam kerangka penelitian WEMC (2006) adalah peningkatan kapasitas untuk membuat keputusan mandiri yang mengubah hubungan kekuasaan-kekuasaan yang tidak dikehendaki.

Perlindungan diberikan secara khusus kepada perempuan dan anak-anak karena perannya yang sangat besar bagi masa depan bangsa sebagai pendidik utama bagi generasi penerus bangsa dan generasi bangsa yang lebih berkualitas menuju Indonesia yang dicita-citakan.

Kesetaraan gender menurut UNESCO adalah suatu kondisi dimana semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda karena mereka punya kebutuhan yang berbeda, baik secara biologis maupun konstruksi sosial budaya.

Kesetaraan gender dilakukan dengan terus mendorong optimalisasi peran perempuan sesuai dengan kemampuan, kapasitas, bakat, minat, serta keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya baik secara psikis maupun fisik.

Pemberdayaan perempuan meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan perempuan sebagai ibu dalam keluarga yang penting dalam pembentukan karakter bangsa.

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan mendorong peran aktif perempuan untuk mendayagunakan potensinya untuk mengintervensi anggota masyarakat lainnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan, tidak menikah pada usia dini karena kesiapan mental dan ekonomi yang belum matang, serta melakukan inisiasi kepada masyarakat untuk membangun karakter bangsa yang positif. Sasaran pemberdayaan perempuan bukan hanya perempuan, namun juga laki-laki karena budaya patriarki yang mengakar kuat mempengaruhi keadilan gender.

Hal penting yang harus menjadi pokok pemberdayaan perempuan adalah:

1. Pentingnya peran ayah dan ibu di dalam tumbuh kembang anak dan menjaga serta melindungi anak dari tindak pelecehan dan kekerasan.
2. Pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik bukan hanya untuk memenuhi kuota 20% keterwakilan perempuan namun merupakan peluang strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
3. Pentingnya meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi mikro, kecil, dan menengah.
4. Pentingnya perempuan dan anak perempuan mendapatkan akses di berbagai aspek kehidupan.
5. Pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak perempuan maupun anak laki-laki.

B. Perencanaan Keluarga

Pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan makmur membutuhkan sumberdaya yang baik dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Keterbatasan sumberdaya mengharuskan adanya perencanaan yang matang dalam pertumbuhan kuantitas penduduk sehingga tercapai kualitas manusia yang

diharapkan. Setiap orang mempunyai peran yang penting dalam perencanaan pertumbuhan kuantitas dan kualitas penduduk.

Hal strategis yang penting diperhatikan adalah :

1. Keterkaitan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan, faktor dinamika kependudukan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
2. Kualitas penduduk dan penyiapan generasi mendatang pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional. Pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM, dan Pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional.
3. Desentralisasi, Pembangunan Kependudukan memiliki keterkaitan yang sangat kuat antara global, Nasional dan Daerah.
4. Hak dan kewajiban dari Pemerintah, pemerintah Daerah serta Penduduk dalam pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
5. Sanksi yang dikaitkan insentif dan disinsentif baik kepada pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
6. Keberhasilan pembangunan kependudukan sangat tergantung pada seluruh komponen yang ada baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat Partisipasi & kepedulian seluruh komponen tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya sanksi yang dikaitkan dengan insentif & disinsentif.
7. Pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga sangat berkait erat dengan pembangunan keluarga berkualitas dan akhirnya menentukan kualitas penduduk secara keseluruhan.
8. Pengelolaan kelahiran, penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk Penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk Ketiga issue tersebut harus diintervensi secara terpadu dengan program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan akhirnya berdampak pada pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan dilakukan dengan mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan baik itu antar wilayah maupun antar masyarakat (pemerataan dan keadilan), **memberdayakan masyarakat** dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang.

Pembangunan yang utama adalah pembangunan manusia yang diarahkan pada kemandirian bangsa untuk kehidupan yang lebih baik, sejajar dengan bangsa yang lain. Manusia yang dicita-citakan adalah berkepribadian, berakhlak mulia, dan mempunyai pendidikan yang tinggi . Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tindakan – tindakan yang merugikan dan merendahkan manusia lainnya yang memiliki beraneka ragam perbedaan, serta secara efektif dan bersama sama mampu mewujudkan hidup yang sejahtera secara moral dan materil.

Kemandirian bangsa atau masyarakat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan yang di bangun dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pemerintahan terutama di tingkat paling dekat dengan masyarakat, kelurahan, mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat, meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi produktif, mengembangkan adat-istiadat dan budaya local, serta meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan mengembangkan teknologi yang tepat guna.

Kemandirian masyarakat yang berproses dan telah dilaksanakan mencerminkan paradigma pembangunan yang *people-centered, participatory, empowering, dan sustainable*. Pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui :

1. Penciptaan iklim dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. *Empowering*, memperkuat potensi atau daya saing yang dimiliki masyarakat.

3. *Protecting*, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Strategi dalam memberdayakan masyarakat adalah pemberdaan masyarakat, perluasan kesempatan, serta pengembangan perlindungan .

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan dilakukan dengan mengurangi disparitas atau ketimangan pembangunan baik itu antar wilayah maupun antar masyarakat (pemerataan dan keadilan), **memberdayakan masyarakat** dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang.

Pembangunan yang utama adalah pembangunan manusia yang diarahkan pada kemandirian bangsa untuk kehidupan yang lebih baik, sejajar dengan bangsa yang lain. Manusia yang dicita-citakan adalah berkepribadian, berakhlak mulia, dan mempunyai pendidikan yang tinggi. Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tindakan – tindakan yang merugikan dan merendahkan manusia lainnya yang memiliki beraneka ragam perbedaan, serta secara efektif dan bersama sama mampu mewujudkan hidup yang sejahtera secara moral dan materil .

Kemandirian bangsa atau masyarakat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan yang di bangun dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pemerintahan terutama di tingkat paling dekat dengan masyarakat, kelurahan, mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat, meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi produktif, mengembangkan adat-istiadat dan budaya local, serta meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan mengembangkan teknologi yang tepat guna.

Isu Strategis dirumuskan dari beberapa kondisi penting yang menjadi perhatian serius dalam pembangunan Adapun isu-isu strategis terkait masalah Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

1. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral.
2. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Belum optimalnya Penganggaran: CSR dan Crowdfunding untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program-program perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet.
4. Belum maksimalnya pengelolaan profil kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

Strategi dalam memberdayakan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan, serta pengembangan perlindungan .

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Perubahan Renstra DP3AP2KB Kota Cimahi dan tingkat kinerja yang dicapai DP3AP2KB dengan mengacu pada prioritas program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 dengan tema pembangunan yaitu “Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk DP3AP2KB dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi yang fokus terhadap program prioritas Kota Cimahi Tahun serta misi pada RPD 2023 – 2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB yaitu misi ke-2: Meningkatkan Kualitas

Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berkeadilan dan misi ke 1: Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Rancangan awal RKPD yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan awal RKPD tahun 2025, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta kinerja kegiatan yang belum tercapai maksimal pada Renstra sebelumnya. Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, secara lengkap review terhadap RKPD Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel IKK berikut:

Tabel

No	Rancangan Awal RKPD					Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip, Nilai IKM, Indeks Profesionalitas ASN,	B, B, 50,2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip, Nilai IKM, Indeks Profesionalitas ASN,	B, B, 50,2		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip	B		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip	B		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	Ro. 63.324.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	65.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	Rp. 68.804.750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	175.000.000	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip	B		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Sakip	B		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan ASN yang difasilitasi gaji dan tunjangan	12 Bulan	Rp. 6.867.949.717	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan ASN yang difasilitasi gaji dan tunjangan	12 Bulan	Rp. 6.283.840.760	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD;	12 Laporan	Rp. 51.439.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD;	12 Laporan	50.000.000	
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Profesionalisme ASN	50%		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Profesionalisme ASN	50%		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	Rp. 39.000.000						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Rp. 21.000.000						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	60 Orang	Rp. 71.510.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	60 Orang	60.000.000	
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai IKM Perangkat Daerah	B		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai IKM Perangkat Daerah	B		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp. 11.578.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instansi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Laporan	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Rp. 54.473.500	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	175.000.000	

		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 7.072.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 81.074.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 62.432.750	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp. 9.450.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp. 174.234.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp. 600.000.000						

		Semua Kelurahan	yang Disediakan								
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp. 75.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	120.000.000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana yang dipelihara	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana yang dipelihara	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas jasa komunikasi, air dan listrik	12 Laporan	Rp. 28.884.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas jasa komunikasi, air dan listrik	12 Laporan	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 45.780.000	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitas pelayanan umum kantor	12 Laporan	Rp. 114.666.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitas pelayanan umum kantor	12 Laporan	95.000.000	
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya	Kota Cimahi, Semua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	15 unit	Rp. 318.769.260	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya	Kota Cimahi, Semua	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit	350.000.000	

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan, Semua Kelurahan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan, Semua Kelurahan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp. 182.540.000						
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	69%		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	69%		
8.	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG (7 prasyarat penilaian APE : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM, data dan sistem informasi, metode dan partisipasi masyarakat/kerja sama	1 dokumen		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG (7 prasyarat penilaian APE : komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, SDM, data dan sistem informasi, metode dan partisipasi masyarakat/kerja sama	1 dokumen		
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 453.981.000	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	220.000.000	
9.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	5 Kegiatan		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada	5 Kegiatan		

	Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kelurahan	Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kelurahan	Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil sosialisasi Peningkatan Partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5 dokumen	Rp. 214.594.750	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil sosialisasi Peningkatan Partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5 dokumen	300.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat Penanganan Terpadu	100%		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat Penanganan Terpadu	100%		
10.	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan Fasilitasi Kegiatan P2TP2A	12 Bulan		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan Fasilitasi Kegiatan P2TP2A	12 Bulan		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban kekeraan terhadap perempuan yang tertangani	15 Orang	Rp. 750.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	15 Orang	400.000.000	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100%		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100%		
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan		
	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk		Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan	4 dokumen	Rp. 384.479.700	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk		Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan	4 dokumen	450.000.000	

peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota		masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota			peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota		masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender;	75%		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender;	75%		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	Rp. 80.026.750	Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	90.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar	89%		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Anak Yang Terlayani Kebutuhan Dasar	89%		
Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	12 bulan		Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	12 bulan		
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	10 organisasi	Rp. 266.335.900	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan	10 organisasi	140.000.000	

			Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp. 181.180.750	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu;	100%		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu;	100%		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		Rp. 155.142.800	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak		175.000.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kelurahan yang terbina administrasi pemerintahan	100%		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase kelurahan yang terbina administrasi pemerintahan	100%		
13.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	4 kegiatan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	4 kegiatan		
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	15 dokumen	Rp. 16.880.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	15 dokumen	80.000.000	

		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 kegiatan	Rp. 187.510.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 kegiatan	220.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%		
14.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%		
	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(1). 5 dokumen;	Rp. 459.192.000	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(1). 5 dokumen;	600.000.000	
	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	(1). 75 Lembaga;	Rp. 231.690.260	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	(1). 75 Lembaga;	250.000.000	

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Masyarakat Hukum Adat			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Masyarakat Hukum Adat			
Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(1). 75 unit;	Rp. 516.492.013	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	(1). 75 unit;	330.000.000	
Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	(1). 1 dokumen	Rp. 51.814.900	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	(1). 1 dokumen	60.000.000	
Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;	(1). 3 Laporan	Rp. 188.960.000	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;	(1). 3 Laporan	300.000.000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah laporan fasilitasi Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;	(1). 1 Kegiatan		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah laporan fasilitasi Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;	(1). 1 Kegiatan		
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;	(1). 4 dokumen	Rp. 603.447.800	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;	(1). 4 dokumen	440.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua	(1). Rata - rata jumlah anak perkeluarga (2). Unmeet Need (persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	(1).2,3 (2). 12,5 %		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		(1). Rata - rata jumlah anak perkeluarga (2). Unmeet Need (persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	(1).2,3 (2). 12,5 %		

		Kelurahan	terpenuhi)					terpenuhi)			
15.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi sekolah siaga kependudukan	2 sekolah		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi sekolah siaga kependudukan	2 sekolah		
	Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal Dan Informal	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	(1) 2 Satuan Pendidikan	Rp. 79.211.550	Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal Dan Informal	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	(1) 2 Satuan Pendidikan	100.000.000	
	Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	(1).20 Organisasi;	Rp. 23.728.750	Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	(1).20 Organisasi;	33.000.000	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Kegiatan	Rp. 60.000.000						
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data mikro keluarga	1 dokumen		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen data mikro keluarga	1 dokumen		
	Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	20 organisasi	Rp. 612.280.700	Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan,	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	20 organisasi	550.000.000	

		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	Rp. 50.000.000						
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio akseptor KB MKJP	35,92%		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Rasio akseptor KB MKJP	35,92%		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1 Tahun							
	Pengendalian Program KKBPK	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rp. 80.000.000						
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	Rp. 58.000.000						
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	12 laporan	Rp. 45.000.000						

			(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Rp. 150.000.000						
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	Rp. 54.000.000						
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	Rp. 250.000.000						
16.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Calon akseptor yang telah mendapatkan informasi dan edukasi	1000 orang		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Calon akseptor yang telah mendapatkan informasi dan edukasi	1000 orang		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	410 Orang	Rp. 879.322.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	390 Orang	1.000.000.000	

	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan pengembangan Program Bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	19 Organisasi	Rp. 1000.000	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan pengembangan Program Bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan Falitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan pengembangan Program Bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		575.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	Rp. 783.000.000						
18.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas pengendalian dan pendistribusia kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kota	1 Tahun		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	ota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Rp. 11.200.000						
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	ota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka	800 Orang	Rp. 457.925.000						

		Kelurahan	Panjang (MKJP)								
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	ota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	Rp. 51.600.000						
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	ota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	Rp. 199.642.000						
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Sera Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1 tahun		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Sera Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1 tahun		
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan	2 laporan	Rp. 58.773.000	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan	2 laporan	70.000.000	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	Rp. 146.250.000						
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 kampung	Rp. 50.000.00						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Kota Cimahi, Semua	(1) Cakupan PUS <20 tahun (2). Cakupan	(1). 0,35 (2).47.5, 27.5,		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN		(1) Cakupan PUS <20 tahun (2). Cakupan kepesertaan	(1). 0,35 (2).47.5, 27.5,		

	KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kecamatan, Semua Kelurahan	kepesertaan dalam BKB,BKR, BKL,UPPKS PIK-R/M	29,72. 0.9 dan 9,16		KELUARGA SEJAHTERA (KS)		dalam BKB,BKR, BKL,UPPKS PIK-R/M	29,72. 0.9 dan 9,16		
20.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	419 kelompok		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	419 kelompok		
	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7 Laporan	Rp. 83.580.250	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1). Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7 Laporan	110.000.000	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Keluarga	Rp. 25.000.000						
	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL		Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000						
	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Laporan	Rp. 335.005.450	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	(1).Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	175.000.000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	15 unit	Rp. 180.000.000						

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia									
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1314 Orang	Rp. 50.000.000							
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	15 Laporan	Rp. 30.000.000							
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1314 Orang	Rp. 2.759.400.000							
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kelompok	Rp. 191.174.850							

	(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk								
21.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 kegiatan		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 kegiatan		
	Promosi Dan Sosialisasi Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4 laporan	Rp. 141.174.850	Promosi Dan Sosialisasi Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Laporan 19 Organisasi	175.000.000	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3000 Laporan	Rp. 50.000.000						

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai salah satu upaya dalam rangka menampung aspirasi dan usulan dari masyarakat setiap tahun selalu diadakan musrenbang dengan harapan bahwa hasil dari musrenbang dapat tertuang ke dalam Rencana Kerja Dinas. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada dimaksimalkan keinginan dari masyarakat dapat diselaraskan dengan kebutuhan pada rencana kerja dinas guna mendukung cita-cita pembangunan Kota Cimahi.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan. Perencanaan kegiatan pada Disdagkoperin Kota Cimahi mendasar pada:

a. Program Dinas berdasarkan usulan dari data teknis terkait tugas pokok dan fungsi, yaitu:

- a) Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b) Program Perlindungan Perempuan;
- c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d) Program Pengelolaan Data Gender dan Anak;
- e) Program Pemenuhan Hak Anak;
- f) Program Perlindungan Khusus Perempuan;
- g) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- h) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- i) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- j) Program Pengendalian Penduduk;
- k) Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- l) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

b. Usulan Dari Masyarakat Dengan Mekanisme Musrenbang

Usulan dari masyarakat kepada DP3AP2KB secara garis besar sudah diakomodir dalam program dan kegiatan pada Renja Tahun 2024, namun mengingat sangat terbatasnya anggaran di

DP3AP2KB Kota Cimahi, usulan dari masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir sesuai usulan terbanyak dan melihat kebutuhan yang paling penting dan mendasar bagi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB KOTA CIMAHI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional sudah seharusnya menjadi pedoman yang harus dijadikan dasar pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan arah pembangunan Kota Cimahi. Arah kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 - 2024

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 Poin Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024, point 3 terkait dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB yang dideskripsikan sebagai berikut:

Poin 3 . Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

1. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dalam mencapai tujuannya harus senantiasa didukung oleh berbagai sumber daya yang memadai agar bisa memberikan pelayanan yang optimal.

Sesuai dengan visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yaitu **“CIMAHI CERDAS”**, DP3AP2KB Kota Cimahi turut bertanggungjawab untuk mewujudkan visi tersebut sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Berdasarkan penjabaran atas misi Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, DP3AP2KB Kota Cimahi mendukung dan sangat terkait dengan misi ke-1 serta misi 5 yaitu:

Misi Kesatu : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

Misi kesatu tersebut diidentifikasi kembali sehingga disusunlah tujuan serta sasaran perangkat daerah terkait, dengan harapan dapat mewujudkan misi kesatu secara efektif dan efisien tanpa meninggalkan sisi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut tujuan serta sasaran dari Misi Ketiga:

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sasaran:

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender
2. Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak
3. Pengendalian Penduduk yang sesuai dengan daya tampung Kota

Berpijak pada keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, DP3AP2KB akan mengimplementasikan strategi serta arah kebijakan yang dapat mewujudkan tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sangat terkait dengan tugas pokok serta fungsi dari DP3AP2KB:

Strategi

1. Meningkatkan kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Perlindungan Anak
3. Penguatan dan Pemanduan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender

2. Meningkatkan Perlindungan dan tumbuh kembang Anak
3. Meningkatkan Mengembangkan inovasi Promosi Keluarga Berencana
4. Meningkatkan Mengembangkan inovasi Promosi Keluarga Berencana
5. Peningkatan Kualitas layanan Administrasi pemerintahan daerah
6. Peningkatan Kualitas layanan Administrasi pemerintahan daerah
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Melihat hasil evaluasi dari masing-masing bidang dan evaluasi efektifitas anggaran dan evaluasi kebutuhan yang sejalan dengan RPJPD Perubahan maka disusun program, kegiatan, dan sub-kegiatan akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada RPD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 – 2026 Rencana Strategis DP3AP2KB TA 2023-2026, RKPD 2025, serta mengakomodir hasil masukan dari masyarakat yang tertuang dalam hasil Musrenbang Tahun 2025.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			21.552.805.550,00				23.508.500.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.552.805.550,00				23.508.500.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			11.436.725.027,00				11.591.000.000,00
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.950.983.377,00			-	9.011.000.000,00
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Tahun	132.129.550,00			-	105.000.000,00
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	63.324.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55.000.000,00

	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	68.804.750,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan daerah	1 Tahun	6.919.389.417,00			-	7.550.000.000,00
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	6.867.949.717,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.500.000.000,00
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	51.439.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun	131.510.000,00			-	138.000.000,00

	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	39.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		45.000.000,00
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	21.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		28.000.000,00
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	71.510.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		65.000.000,00
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	402.314.650,00			-	429.000.000,00

2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.578.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12.000.000,00
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.473.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		47.500.000,00
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.072.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9.000.000,00
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.074.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		85.000.000,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	62.432.750,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		65.000.000,00
2.08.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu								

			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	9.450.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.500.000,00
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	176.234.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah fasilitas pengadaan barang milik daerah</i>	1 Tahun	675.000.000,00			-	110.000.000,00
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	600.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0,00

	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	75.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000,00
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	1 Tahun	189.330.500,00			-	210.000.000,00
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	28.884.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		65.000.000,00
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	45.780.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	114.666.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		95.000.000,00

	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	501.309.260,00			-	469.000.000,00
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			0	0 0	318.769.260,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		280.000.000,00
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	182.540.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		189.000.000,00
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	668.576.750,00			-	660.000.000,00
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kota	1 Tahun	453.981.000,00			-	375.000.000,00

	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	453.981.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		375.000.000,00
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kota	1 Tahun	214.594.750,00			-	275.000.000,00
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi							
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	214.594.750,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		275.000.000,00
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	750.000.000,00			-	700.000.000,00
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kota	1 Tahun	750.000.000,00			-	700.000.000,00
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	750.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		700.000.000,00

4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	384.479.700,00			-	600.000.000,00
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota	1 Tahun	384.479.700,00			-	600.000.000,00
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	384.479.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000,00
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	80.026.750,00			-	80.000.000,00
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	1 Tahun	80.026.750,00			-	80.000.000,00
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	80.026.750,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.000.000,00
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	447.516.650,00			-	390.000.000,00

	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota	1 Tahun	447.516.650,00			-	390.000.000,00
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	19 Organisasi	266.335.900,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		205.000.000,00
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	181.180.750,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		185.000.000,00
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	155.142.800,00			-	160.000.000,00
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota	1 Tahun	155.142.800,00			-	160.000.000,00
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA							

			<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>	100 Orang	155.142.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		160.000.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			2.255.986.973,00				2.882.500.000,00
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	204.390.000,00			-	207.500.000,00
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan</i>	1 Tahun	204.390.000,00			-	207.500.000,00
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa							
			<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>	15 Dokumen	16.880.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17.500.000,00
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	2 Dokumen	187.510.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		190.000.000,00
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	2.051.596.973,00			-	2.675.000.000,00

	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan	1 Tahun	2.051.596.973,00			-	2.675.000.000,00
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	459.192.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		775.000.000,00
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Lembaga	231.690.260,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250.000.000,00
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	19 Unit	516.492.013,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		775.000.000,00
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	3 Dokumen	51.814.900,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	2 Laporan	188.960.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		190.000.000,00
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	12 Dokumen	603.447.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		625.000.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.860.093.550,00				9.035.000.000,00
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	825.221.000,00			-	847.000.000,00

2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah fasilitasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah	1 Tahun	162.940.300,00			-	185.000.000,00
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal							
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	10 Satuan Pendidikan	79.211.550,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.000.000,00
2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan							
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	30 Organisasi	23.728.750,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000,00
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana							
		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Kegiatan	60.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		70.000.000,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kota	1 Tahun	662.280.700,00			-	662.000.000,00

	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga							
			<i>Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya</i>	1 Dokumen	612.280.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		660.000.000,00
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							
			<i>Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>	2 Laporan	50.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	3.300.712.000,00			-	3.753.000.000,00
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Jumlah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal</i>	1 Tahun	637.000.000,00			-	715.000.000,00
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KBPK							
			0	0 0	80.000.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB		85.000.000,00
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana							

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	12 Laporan	58.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		90.000.000,00
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
			<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	12 Laporan	45.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		50.000.000,00
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
			<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		155.000.000,00
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal							

			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	54.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		60.000.000,00
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	250.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		275.000.000,00
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah fasilitasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB	1 Tahun	1.663.322.000,00			-	1.952.000.000,00
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	410 Orang	879.322.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.150.000.000,00
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB							
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	19 Organisasi	1.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							

			<i>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i>	12 Laporan	783.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		800.000.000,00
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah fasilitasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kota</i>	1 Tahun	745.367.000,00			-	869.000.000,00
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	12 Laporan	11.200.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		12.000.000,00
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	800 Orang	457.925.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		475.000.000,00
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	51.600.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		55.000.000,00
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak							
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	199.642.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		325.000.000,00
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan							
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	150 Orang	25.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah	1 Tahun	255.023.000,00			-	217.000.000,00
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	10 Organisasi	58.773.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		65.000.000,00

	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	12 Laporan	146.250.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		150.000.000,00
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas							
			<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	1 Kampung	50.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	3.734.160.550,00			-	4.435.000.000,00
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah fasilitasi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	1 Tahun	3.542.985.700,00			-	4.075.000.000,00
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	4 Laporan	83.580.250,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250.000.000,00

2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Keluarga	25.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL								
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	335.005.450,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		725.000.000,00
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								

			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	15 Unit	180.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		190.000.000,00
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1314 Orang	50.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	15 Laporan	30.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1314 Orang	2.759.400.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		2.900.000.000,00

	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)							
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	1 Kelompok	30.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000,00
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	1 Tahun	191.174.850,00			-	360.000.000,00
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja							
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4 Laporan	141.174.850,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000,00
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3000 laporan	50.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
	J U M L A H				21.552.805.550,00				23.508.500.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2025 disusun sebagai pedoman atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan kegiatan tahun 2024 oleh setiap Bidang, ini menunjukkan agar dalam pengajuan setiap kegiatan harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tahapan tahapan setiap tahunnya.

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Pada DP3AP2KB Kota Cimahi deselaraskan dengan Rencana strategis DP3AP2KB tahun 2023 – 2026. Pada tahun anggaran 2025, DP3AP2KB Kota Cimahi mengelola 12 Program 23 Kegiatan 44 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 21.552.805.550,-

4.2. Rencana Pagu Indikatif

Rencana Penganggaran Program dan Kegiatan DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2025 dalam tabl. 4.2 telah disusun memperhitungkan perkiraan maju

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Indikatif Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Dana/Pagu Indikatif Renja 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
	Sub Kegiatan:	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.324.800,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.804.750,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan:	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.867.949.717
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.439.700
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan:	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71.510.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan:	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.578.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.473.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.072.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.074.400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.432.750
	Penyediaan Kunjungan Tamu	9.450.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.234.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan:	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan:	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.884.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.780.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.666.500
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
	Sub Kegiatan:	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.769.260
II	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1	<i>Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	453.981.000
2	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	214.594.750
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
1	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
1	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesertaan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	

	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	384.479.700
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
1	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	80.026.750
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
1	<i>Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	266.335.900
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	181.180.750
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
1	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	155.142.800
VIII	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
1	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	
	Sub Kegiatan :	

	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	16.880.000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	187.510.000
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
1	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	459.192.000
	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	231.690.260
	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	516.492.013
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa	51.814.900
	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	188.960.000
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	603.447.800
X	PENGENDALIAN PENDUDUK	
1	<i>Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka</i>	

	Pengendalian Kuantitas Penduduk	
	Sub Kegiatan :	
	Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal Dan Informal	79.211.550
	Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	23.728.750
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	60.000.000
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga	612.280.700
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	50.000.000
XI	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	58.000.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	45.000.000
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	54.000.000
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000

2	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	879.322.000
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.000.000
	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan, dan pengembangan Program Bangga kencana untuk petugas Keluarga Berencana atau Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	783.000.000
3	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.200.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	457.925.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51.600.000
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	199.642.000
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	25.000.000
4	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	58.773.000
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	146.250.000
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	50.000.000

XII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
1	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	
	Sub Kegiatan :	
	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	83.580.250
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	25.000.000
	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	50.000.000
	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	335.005.450
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	180.000.000
	<i>Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	50.000.000,00
	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	30.000.000,00
	<i>Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i>	2.759.400.000,00
	<i>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</i>	30.000.000,00
2	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah</i>	

	Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
	Sub Kegiatan :	
	Promosi Dan Sosialisasi Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	1414.174.850
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	50.000.000
	JUMLAH	21.552.805.550

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2025 disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi tahun 2025 terdiri dari 12 Program, 23 Kegiatan dan 54 sub Kegiatan. Jumlah Rencana Anggaran Tahun 2025 Secara keseluruhan berjumlah Rp. 21.552.805.555,-.

Pelaksanaan rencana kerja tergantung sepenuhnya kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, serta sejauh mana kinerja serta dukunga sumber daya yang dimiliki baik sarana maupun prasarana yag ada , Kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya harus membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber angaran.
2. Menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kepala DP3AP2KB Kota Cimahi wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2025 melalui upaya koreksi dan penyampaian hasil evaluasi kepada Pj.Wali Kota Cimahi melalui kepala Bappelitbangda Kota Cimahi setiap Triwulan.
3. Melakukan koordinasi yang maksimal dengan semua pihak yang mempunyai keterkaitan program dan kegiatan baik secara vertikal maupun interen sehingga ketercapaian program dan kegiatan bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan serta pencapaian realisasi kinerja dan keuangan demi mencapai keberhasilan Dinas dan Pemerintah Kota Cimahi.

Demikian rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi kami susun sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ditahun 2025.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA CIMAHI,**


dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pembina Utama Muda
NIP. 9680101 199803 2 009